

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LANNY JAYA**

### **COMMUNITY PARTICIPATION IN REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING IN LANNY JAYA REGENCY**

**Jacky Hattu, Agustina Ivonne Poli\*, dan Bernathius Julison**

Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Cenderawasih

Jl. Raya Abepura-Sentani, Abepura, Kota Jayapura, Indonesia

\*e-mail penulis korespondensi: poli\_ivonne@yahoo.com

#### **ABSTRAK**

Jumlah masyarakat yang mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan daerah pada setiap distrik di Kabupaten Lanny Jaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, padahal masyarakat memiliki peran penting dalam setiap program pemerintah termasuk proses penentuan kebijakan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat, tingkatan partisipasi masyarakat, serta mengetahui faktor penentu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lanny Jaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian dan data diperoleh melalui penyebaran kuesioner serta pengamatan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat berupa solidaritas dalam diskusi kelompok, khususnya saat dalam pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya, khususnya pada saat mengikuti musrenbang, berada pada kategori tinggi. Dalam musrenbang daerah, lebih banyak partisipan laki-laki (99,2 %), mayoritas responden berusia 31 – 40 tahun (53,3%), dan sebagian besar memiliki pendidikan SMA sederajat (45,8%). Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam musrenbang disebabkan oleh faktor budaya patriarki yang masih erat dipegang di Kabupaten Lanny Jaya.

**Kata kunci :** *Perencanaan, Pembangunan, Partisipasi Masyarakat*

#### **ABSTRACT**

The number of people who take part in regional development planning deliberations in each district in Lanny Jaya Regency has decreased from year to year, even though the community has an important role in every government program, including the policy determination process therein. This research aims to determine the forms of community participation, levels of community participation, and determine the determining factors of community participation in development planning through regional development planning meetings in Lanny Jaya Regency. This research uses a quantitative descriptive method by describing the actual situation of the research object and data obtained through distributing questionnaires and observations in the field. The research results show that the form of community participation takes the form of solidarity in group discussions, especially when making decisions. The level of community participation in Lanny Jaya Regency, especially when participating in musrenbang, is in the high category. In the regional musrenbang, there were more male participants (99.2%), the majority of respondents were aged 31 – 40 years (53.3%), and most had a high school or equivalent education (45.8%). The low level of women's participation in musrenbang is caused by patriarchal cultural factors which are still closely held in Lanny Jaya Regency.

**Keywords:** *Planning, Development, Community Participation*

#### **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional dapat dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan adalah suatu

proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah (UU Nomor 25, 2004).

Proses perencanaan sendiri dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk menyusun hubungan optimal antara *input*, proses, dan *output/outcomes* atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan serta menciptakan dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka dan masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Jadi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan (Purnamasari, 2008).

Musyawarah perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*). Idealnya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah melibatkan masyarakat/*stakeholder* non-pemerintah, mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan, termasuk memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Ini semua bisa terwujud apabila pemerintah duduk secara bersama dan setara dengan warganya dalam memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat ke depan. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana pemerintah merespon hal tersebut. Namun melihat kenyataan yang ada di Kabupaten Lanny Jaya, masyarakat di sana bersikap apatis terhadap musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Sejak terbentuknya Kabupaten Lanny Jaya sampai dengan tahun 2023 telah dilaksanakan agenda-agenda perencanaan dimana setiap tahunnya dijalankan agenda musyawarah perencanaan pembangunan daerah atau dikenal dengan sebutan Musrenbang, yang melibatkan masyarakat, guna bersama-sama merencanakan dan menetapkan setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai mitra. Namun berdasarkan data kehadiran/keikutsertaan warga dalam agenda Musrenbang Distrik, terjadi pengurangan jumlah partisipan (lihat Tabel 1).

**Tabel 1. Rekapitan Daftar Hadir Peserta Musrenbang Distrik Tahun 2015 – 2022 Kabupaten Lanny Jaya**

No.	Distrik	JUMLAH KEHADIRAN (ORANG)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tiom	62	58	48	32	24	18	15	9
2	Kuyawage	40	33	28	15	10	8	5	5
4	Tiomneri	35	28	20	22	15	10	9	9
4	Malagaineri	35	28	17	10	10	7	5	5
5	Balingga	25	15	15	17	11	6	5	5
6	Pirime	42	35	24	18	15	9	7	9
7	Dimba	45	39	21	15	14	7	5	3
8	Gamelia	40	42	32	29	25	10	8	3
9	Poga	41	48	30	26	18	9	7	3
10	Makki	45	62	43	33	20	13	10	10
11	Niname	38	35	30	21	20	11	9	5
12	Nogi	44	39	32	25	14	10	8	6
14	Yiginua	39	35	33	26	18	12	10	5
14	Tiom Olo	46	41	34	20	13	9	9	6
15	Yugungwi	39	32	30	23	18	9	9	5
16	Mokoni	32	30	17	18	10	9	5	3
17	Wereka	30	30	21	15	11	9	5	3
18	Milimbo	33	33	23	17	13	9	5	2
19	Wiringgabat	36	30	20	13	9	7	8	3
20	Gollo	42	40	32	26	16	11	9	6
21	Awina	48	44	30	22	15	10	8	5
22	Ayumnati	37	32	28	17	14	10	9	7
24	Wano Barat	33	27	18	15	8	9	8	5
24	Goa Balim	30	22	16	14	9	8	5	5
25	Bruwa	31	26	10	12	8	5	5	4
26	Balingga Barat	36	28	18	13	6	7	5	5
27	Gupura	33	24	16	11	9	10	8	5
28	Kolawa	38	35	28	14	11	8	8	7
29	Gelok Beam	51	47	39	30	26	15	10	6
30	Kuly Lanny	50	43	36	30	23	10	8	6
31	Lannyna	47	45	39	27	21	13	8	5
32	Karu	41	33	24	35	26	15	13	7
34	Yiluk	47	46	31	30	20	13	11	5
34	Guna	49	42	39	25	16	11	9	5
35	Kelulome	52	47	35	29	22	14	11	7
36	Nikogwe	51	42	31	30	24	18	10	6
37	Muara	45	40	29	25	18	14	10	5
38	Buguk Gona	39	30	18	20	19	12	8	5
39	Melagi	40	31	19	15	11	10	5	5
<b>Jumlah</b>		<b>1.609</b>	<b>1.431</b>	<b>1.065</b>	<b>835</b>	<b>610</b>	<b>404</b>	<b>311</b>	<b>203</b>

Sumber : Dokumen Musrenbang Bappeda Kabupaten Lanny Jaya, 2023

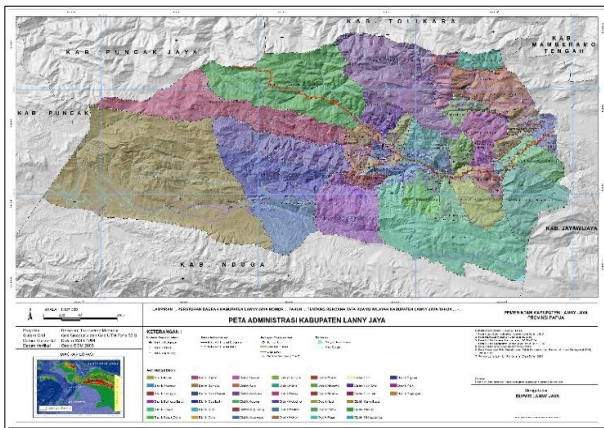
Penurunan partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan daerah bukanlah hal yang dapat dipandang sebagai suatu hal yang wajar. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis agar diperoleh informasi yang lebih akurat tentang sebab dan akibat yang sedang berlangsung dalam fenomena sosial tersebut. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat, tingkatan partisipasi masyarakat, serta mengetahui faktor penentu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lanny Jaya.

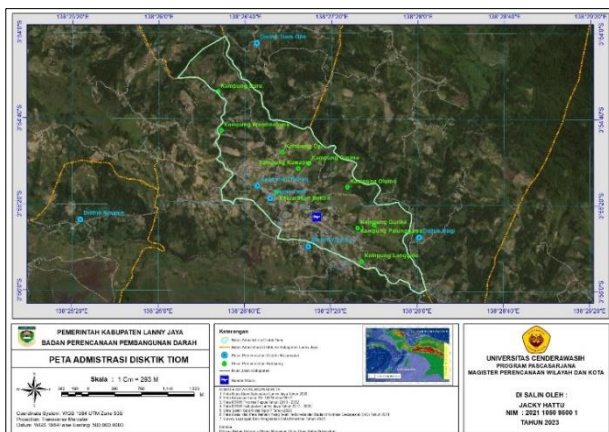
## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner terstruktur dengan menggunakan skala Likert, dan pengamatan di lapangan.

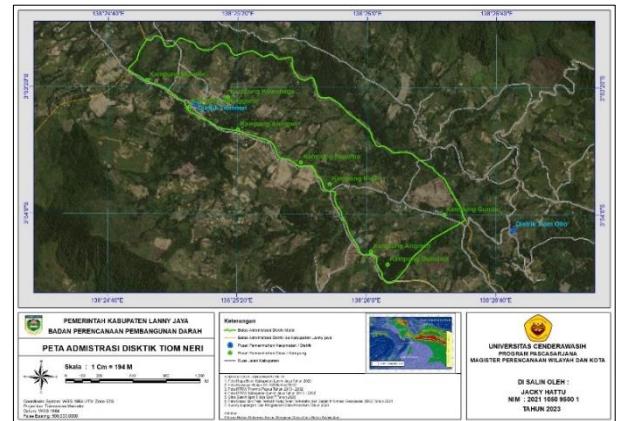
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lanny Jaya dengan mengamati proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023, di empat distrik sebagai sampel, yaitu: Distrik Tiom, Distrik Makki, Distrik Tiomneri dan Distrik Gamelia.



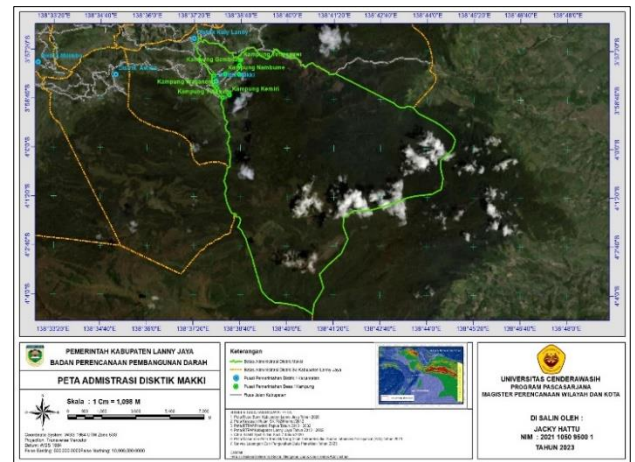
Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Lanny Jaya  
Sumber : Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, 2023



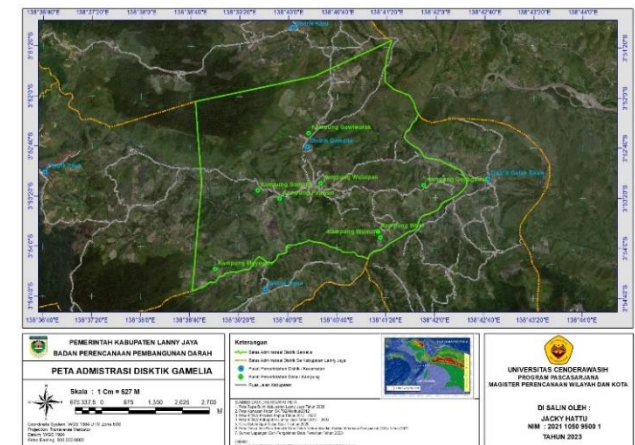
Gambar 2. Peta Administrasi Distrik Tiom  
Sumber : Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, 2023



Gambar 3. Peta Administrasi Distrik Tiom Neri  
Sumber : Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, 2023



Gambar 4. Peta Administrasi Distrik Makki  
Sumber : Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, 2023



Gambar 5. Peta Administrasi Distrik Gamelia  
Sumber : Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, 2023

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Ulva (2017), beragam bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat;
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam musrenbang berupa pelibatan diri pada kegiatan diskusi kelompok dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat pada keempat distrik yang terlibat dalam musrenbang menunjukkan solidaritas dalam diskusi kelompok dan dalam proses pengambilan keputusan atau keseluruhan partisipan cenderung menyetujui setiap keputusan yang diambil tanpa ada perseteruan atau konflik.

Dalam diskusi kelompok atau proses pengambilan keputusan, setiap peserta merasa puas, lega dan senang tanpa terlihat adanya tekanan dari pihak lain sehingga menciptakan situasi diskusi yang lebih baik.

Partisipan yang mengikuti musrenbang menunjukkan penerimaan pasif, mengerti, menuruti, dan sependapat, dalam diskusi kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang direncanakan dapat diterima atau disetujui oleh partisipan yang hadir.

**Tabel 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang di Kabupaten Lanny Jaya**

Pernyataan	Persen
Terlibat Dalam Proses Kegiatan	74 %
Memberikan Informasi	71 %
Konsultasi	71 %
Menyampaikan Pendapat	69 %
Menyampaikan Ide / Gagasan	68 %
Mengambil Keputusan Bersama	69 %
Menjadi Mitra	57 %
Memberikan Dukungan	68 %

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lanny Jaya, masyarakat banyak terlibat dalam bentuk partisipasi: mengikuti proses kegiatan (74%), memberikan informasi (71%) dan konsultasi (71%), sedangkan yang terendah berada pada bentuk partisipasi menjadi mitra (57%).

#### Tingkat Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa tingkatan partisipasi peserta yang menunjukkan kualitas keterlibatan warga dalam suatu proses perencanaan partisipatif. Delapan tingkatan partisipasi masyarakat dari yang tertinggi sampai terendah menurut Arnstein (Kurnia, 2011) yaitu:

1. Kontrol masyarakat (*Citizen Control*), pada tingkat ini kontrol masyarakat terjadi dalam segala aspek.
2. Pelimpahan kekuasaan (*Delegated Power*), negosiasi antara penduduk dan pemerintah diperoleh melalui pembuatan keputusan penuh yang berada di tangan masyarakat dengan mendelegasikan pendapatnya melalui wakil dalam parlemen.
3. Kemitraan (*Partnership*), adanya kesepakatan untuk berbagai perencanaan dan tanggung jawab pembuatan keputusan melalui struktur kerja sama kebijaksanaan, komite perencanaan dan mekanisme yang dapat memecahkan persoalan.
4. Peredaman (*Placation*), masyarakat mulai memiliki tingkat pengaruh melalui tokenism jelas terlihat, tapi pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut tergantung pelaksanaan dari prioritas yang ditetapkan golongan elite.
5. Konsultasi (*Consultation*), masyarakat diberi kesempatan dalam memberikan opini mereka, tapi tidak dikombinasikan dengan kepastian bahwa perhatian dan ide mereka akan diperhitungkan.
6. Informasi (*Information*), penekanan bentuk partisipasi dalam pemberian informasi satu arah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, tanpa disediakan umpan balik dan kekuatan untuk negosiasi. Sering kali informasi disampaikan terlambat dibanding perencanaannya.
7. Terapi (*Therapy*), bentuk partisipasi yang dilakukan adalah menggalang masyarakat dalam kegiatan yang intensif, tapi fokusnya bukan untuk mengobati mereka dari penyakit yang dihadapi, tetapi lebih merupakan tindakan yang rasial dan penipuan yang menciptakan penyakit tersebut.
8. Manipulasi (*Manipulation*), partisipasi terjadi dimana kelompok elite sosial yang minoritas menjadi pelaksana dan penentu pelaksanaan komite/organisasi. Tujuan utama sebenarnya

bukan untuk memberikan kesempatan masyarakat yang kurang mampu untuk mempunyai suara, tetapi digunakan untuk kepentingan minoritas tersebut.

Keaktifan responden dalam kegiatan musrenbang dapat dijadikan salah satu indikator tingkat partisipasi warga. Bagi responden yang memilih jawaban ‘Setuju’ dan ‘Sangat Setuju’ pada pernyataan yang diajukan dalam kuesioner, diasumsikan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi (diberi skor tinggi). Indikator tingkat partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lanny Jaya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 3. Jumlah Responden Dengan Jawaban ‘Setuju’ Menurut Kelompok Umur Pada Tahap Penyusunan Rencana**

Pernyataan		Usia (Tahun)					Total
		20-30	31-40	41-50	51-60	≥ 61	
Selalu Memberikan Informasi	org	7	6	8	2	0	23
	%	5,8	5,0	6,7	1,7	0,0	19,2
Selalu Berkonsultasi	org	4	9	7	2	0	22
	%	3,3	7,5	5,8	1,7	0,0	18,3
Selalu Menyampaikan Pendapat	org	4	13	7	2	0	26
	%	3,3	10,8	5,8	1,7	0,0	21,7
Selalu Menyampaikan Ide/Gagasan	org	4	11	4	2	0	21
	%	3,3	9,2	3,3	1,7%	0,0	17,5
Selalu Ikut Mengambil Keputusan Bersama	org	2	11	6	2	0	21
	%	1,7	9,2	5,0	1,7	0,0	17,5
Selalu Menjadi Mitra	org	4	6	1	1	0	12
	%	3,3	5,0	0,8	0,8	0,0	10,0
Selalu Memberikan Dukungan	org	4	15	4	3	0	26
	%	3,3	12,5	3,3	2,5	0,0	21,7

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan pilihan jawaban ‘Setuju’ terbanyak berada pada aktivitas memberikan dukungan (21,7%) dan mayoritas responden berada pada kelompok usia 31-40 tahun.

**Tabel 4. Jumlah Responden Dengan Jawaban ‘Sangat Setuju’ Menurut Kelompok Umur Pada Tahap Penetapan Rencana**

Pernyataan		Usia (Tahun)					Total
		20-30	31-40	41-50	51-60	≥ 61	
Selalu Memberikan Informasi	org	6	15	8	2	0	31
	%	5,0	12,5	6,7	1,7	0,0	25,8
Selalu Berkonsultasi	org	4	15	4	3	0	26
	%	3,3	12,5	3,3	2,5	0,0	21,7
Selalu Menyampaikan Pendapat	org	8	12	3	0	0	23
	%	6,7	10,0	2,5	0,0	0,0	19,2
Selalu Menyampaikan Ide/Gagasan	org	6	19	9	3	0	37
	%	5,0	15,8	7,5	2,5	0,0	30,8
Selalu Ikut Mengambil Keputusan Bersama	org	5	17	9	2	0	33
	%	4,2	14,2	7,5	1,7	0,0	27,5
Selalu Menjadi Mitra	org	2	2	4	1	0	9
	%	1,7	1,7	3,3	0,8	0,0	7,5
Selalu Memberikan Dukungan	org	5	17	7	1	0	30
	%	4,2	14,2	5,8	0,8	0,0	25,0

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan pilihan jawaban ‘Sangat Setuju’ terbanyak berada aktivitas pengambilan keputusan bersama (27,5%) dan mayoritas responden berada pada kelompok usia 31-40 tahun.

**Tabel 5. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah**

No	Jumlah	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor	(%)
1-16	16	SS (5)	425	2125	32%
		S (4)	646	2584	39%
		RR (3)	418	1254	19%
		TS (2)	152	304	5%
		STS (1)	279	279	4%
Jumlah Total			1920	6546	100%
Skor Maksimal			9600		
Persentase			68%		
Kriteria			Partisipasi Tinggi		

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Partisipan atau peserta yang mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dari empat distrik diwakili oleh 30 partisipan dari setiap distrik atau total terdapat 120 peserta.

Berdasarkan 16 pernyataan sikap, diperoleh 1920 frekuensi jawaban, dimana jumlah total skor mencapai angka 6546 dan persentase yang diperoleh mencapai 68%, sehingga bisa dikategorikan pada tingkat tinggi.

Tingkat partisipasi masyarakat yang dikatakan tinggi ini berlaku hanya pada saat pelaksanaan musrenbang sedangkan bila melihat keterlibatan warga pada bentuk partisipasi menjadi mitra bisa dikatakan relatif cukup/sedang (57%).



Gambar 6. Peserta Musrenbang di Distrik Gamelia  
Sumber : Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, 2023



Gambar 7. Peserta Musrenbang di Distrik Tiom Neri  
Sumber : Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, 2023



Gambar 8. Peserta Musrenbang di Distrik Makki  
Sumber : Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, 2023

### Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat untuk aktif berpartisipasi, meliputi:

1. Jenis kelamin
2. Usia/Umur
3. Pendidikan

Karakteristik responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Frekuensi Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	119	99.2	99.2	99.2
Perempuan	1	0.8	0.8	100.0
Total	120	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2023

Jumlah responden laki-laki mendominasi agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dimana terdapat 119 responden laki-laki dan 1 responden perempuan. Peluang yang dimiliki kaum perempuan masih sangat rendah untuk bekerja dan berusaha, serta juga kurang dilibatkan dalam agenda-agenda musyawarah bersama warga dan pemerintah. Hal ini disebabkan antara lain karena masih kentalnya budaya patriarki yang secara sosial masih menempatkan kaum laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam kehidupan sosial dan berorganisasi.



Gambar 9. Partisipan Perempuan Dalam Musrenbang Distrik di Kabupaten Lanny Jaya  
 Sumber : Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, 2023

Usia responden sebagai subyek yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Umur (Tahun)	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
20-30	30	25.0	25.0	25.0
31-40	64	53.3	53.3	78.3
41-50	20	16.7	16.7	95.0
51-60	5	4.2	4.2	99.2
≥ 61	1	0.8	0.8	100.0
Total	120	100.0	100.0	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Frekuensi usia responden paling banyak pada usia 31 – 40 tahun sebanyak 64 responden atau 53,3 % sedangkan yang paling sedikit adalah responden dengan usia 61 tahun ke atas atau 0,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan partisipan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum sudah cukup baik, terlihat dari adanya keterlibatan partisipan pada semua kalangan usia, dari kaum muda hingga yang lanjut usia meskipun keterlibatan partisipan kaum muda dan lanjut usia masih sedikit bila dibandingkan dengan partisipan yang masuk pada kalangan usia produktif.

Tingkat pendidikan responden sebagai subyek yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Frekuensi Pendidikan Responden

Pendidikan	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SD	24	20.0	20.0	20.0
SMP/ SLTP	9	7.5	7.5	27.5
SMU/ SMA/ SMK Sederajat	55	45.8	45.8	73.3
Diploma (D-III)	2	1.7	1.7	75.0
Sarjana (S1)	29	24.2	24.2	99.2
Tidak Tamat SD / Tidak Sekolah	1	0.8	0.8	100.0
Total	120	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pendidikan sangatlah penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal ini tingkat pendidikan yang diperoleh suatu masyarakat mempunyai dampak yang kuat terhadap pembangunan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal karena akan mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang serta pola berpikir masyarakat secara luas. Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendidikan SMU/SMA/SMK sederajat, yaitu sebanyak 55 responden atau 45,8 %.

Melihat hasil analisis karakteristik sosial responden, dapat dikatakan bahwa faktor budaya setempat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi warga di Kabupaten Lanny Jaya. Bila lebih banyak warga perempuan diberdayakan dalam kegiatan pembangunan, termasuk dalam aktivitas musrenbang, maka tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya dapat ditingkatkan. Faktor budaya juga mempengaruhi bentuk partisipasi dan proses yang berjalan dalam musrenbang di sana. Tingkat solidaritas warga dapat dikatakan tinggi karena kekerabatan antar warga kampung masih kuat. Demikian pula dengan kepatuhan warga terhadap pemimpin tradisionalnya sehingga masyarakat lebih mudah memberi persetujuannya terhadap suatu keputusan yang diambil dalam komunitas tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi masyarakat pada proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah di Kabupaten Lanny Jaya adalah sebagai berikut :

- a. Terlibat dalam Diskusi Kelompok
- b. Terlibat dalam Pengambilan Keputusan
2. Tingkat partisipasi masyarakat pada proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lanny Jaya relatif tinggi, dengan tahapan kegiatan yang diikuti adalah sebagai berikut :
  - a. Terlibat dalam proses kegiatan (74%)
  - b. Memberikan Informasi (71%)
  - c. Konsultasi (71%)
3. Karakteristik masyarakat yang berpartisipasi dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lanny Jaya tahun 2023 adalah sebagai berikut:
  - a. Mayoritas partisipan adalah laki-laki sedangkan partisipan wanita yang ikut serta dalam Musrenbang hanya 1 peserta. Peran serta masyarakat masih didominasi oleh kaum laki-laki. Peluang yang dimiliki kaum perempuan masih sangat rendah karena masih kentalnya budaya patriarki yang secara sosial masih menempatkan kaum laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral di dalam kehidupan sosial dan berorganisasi.
  - b. Pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan kelompok usia secara umum sudah cukup baik dimana ditemui keterlibatan partisipan pada semua kalangan usia dari kaum muda hingga yang lanjut usia.
  - c. Mayoritas partisipan memiliki pendidikan setingkat SMU/SMA/SMK sederajat (45,8%) sedangkan warga yang memiliki tingkat pendidikan tinggi hanya sekitar 25,9%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianta Y. (2014). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. *Tesis*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, **35 (4)**, 216-224.
- Claudia I. (2020). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Hilman, Hakim Muhammad (2014). *Pengaruh Kultural Sekolah Terhadap Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tematik Program Teknik Elektronika Industri*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kumba Digdowiseiso. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Firgiawan A, M,D. (2018). Partisipasi Masyarakat Pada Musrenbang Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Banten Kabupaten Bantaeng. *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Herrhyanto, N & Tuti, G. (2021). *Analisis Data Dengan Statistika NonParametrik*. Bandung: Yrama Widya
- Kurnia, I. A. (2011). Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan Dalam Program Neighbourhood Development Studi Kasus Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Ngusmanto, H. (2015). *Pemikiran & Praktik Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Peraturan Presiden. (2020). *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*". Jakarta: Sekretariat Negara.
- Perda. (2014). Peraturan Pemerintah Daerah No. 5 Tahun 2014. *Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Tiom : Sekretariat Daerah.
- Perda. (2021). Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 21 Tahun 2021. *Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Tiom: Sekretariat Daerah.
- Profil Kab. Lanny Jaya. (2022). *Lanny Jaya Regency Profile*. Tiom: Bappeda Kabupaten Lanny Jaya.
- H.M. Sidik Priadana, MS Denok Sunarsi. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang: Pascal Books.
- Purnamasari, I. (2008) Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Pundarika, V A. (2022). *Mengenal Arnstein's Ladder dalam Menata Partisipasi Publik*. Jakarta: IAP2 Indonesia.
- Razak. M.R.R, Harfia. (2019). Partisipasi Masyarakat di Daerah Pegunungan terhadap Perwujudan Good Governance. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 15(3). Retrieved from <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/319>.
- Riduwan. (2013). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Riyadi dan Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Riyadi dan Bratakusumah. (2005). *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Multigrafika.
- Sarwono, J. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Setiawan, W. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kampung Sungai Gondang Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Siregar, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Sinambela, L.P, Sinambela Sarton (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Teoritik Dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Soemarmo. (2015). Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjarangan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik). *Tesis Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syaifullah. (2008). Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Magelang. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Ulva Ariya. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 *Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua*. Jakarta: Sekretariat Negara.